

**RENCANA KERJA
KECAMATAN TONGAS
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2023**



**KECAMATAN TONGAS
KABUPATEN PROBOLINGGO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas bimbingan dan karuniaNya sehingga **“Rencana Kerja Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023”** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2023, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, dengan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen Perencanaan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Tongas Tahun Anggaran 2023 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih belum sempurna, sehingga perlu adanya kritik yang sifatnya konstruktif dan masukan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

CAMAT TONGAS
KABUPATEN PROBOLINGGO



ABDUL GHAFUR.S.STP.M.Si

Pembina

NIP. 19810214 199912 1 001

DAFTAR ISI.....iv	
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Landasan Hukum..... 1
1.3	Maksud dan Tujuan 5
1.4	Sistematika Penulisan.....6

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Tahun Berjalan).....	14
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tongas.....	20
Tabel 2.3 (T-C.31) Review Terhadap RKPD Tahun 2021 Kabupaten Probolinggo	26
Tabel 2.4 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Kabupaten Probolinggo Kecamatan Tongas	32
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Kecamatan.....	39
Tabel 3.2 (T-C. 33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tongas Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023.....	44
Tabel 4.1 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Hasil Review Terhadap RKPD Tahun 2023 Kabupaten Probolinggo.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo di bidang pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Review Rencana Strategis Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023. Penyusunan Renja 2023 juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Untuk itu perumusan program, dan kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 akan menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat pemerintah daerah, dan program perangkat daerah di tingkat kabupaten dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

25. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Probolinggo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo 2023 yaitu : untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta prakiraan maju berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Tpngas Kabupaten Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan 2021.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2023, yaitu :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan pengawasan Kecamatan Tongas Kabupaten yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Inspektur Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo tahun lalu (2021), dan perkiraan capaian tahun berjalan (2023), analisis kinerja pelayanan

perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kajian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, serta program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2023.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tongas Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Tongas

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tongas yang berpedoman pada hasil evaluasi rencana kerja kecamatan Tongas pada Tahun 2021 dapat dijabarkan bahwa Kecamatan Tongas melaksanakan 5 (Lima) program yang didalamnya terdapat 10 (Sepuluh) kegiatan dari total anggaran Tahun 2021 sebesar **Rp. 607.360.000,-** maka yang terealisasi/terserap sebesar **Rp. 555.966.573,-** sedangkan anggaran yang tidak terealisasi/terserap sebesar **Rp. 51.393.427,-** sehingga dapat disimpulkan bahwa prosentase anggaran Kecamatan Tongas pada Tahun 2021 yang terserealisasikan sebesar **91,54%** sehingga anggaran Kecamatan Tongas pada Tahun 2021 yang tidak terealisasi sebesar **8,46 %**. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun lalu adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini ditunjang beberapa kegiatan antara lain:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dengan Sub Kegiatan antara lain :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 15.090.000,- dan realisasi dana sebesar Rp. 15.000.000,- (99,40%).
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 0,- dan realisasi dana sebesar Rp. 0,- (0%).
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 0,- dan realisasi dana sebesar Rp. 0,- (0%).
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 0,- dan realisasi dana sebesar Rp. 0,- (0%).

- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 0,- dan realisasi dana sebesar Rp. 0,- (0%).
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 0,- dan realisasi dana sebesar Rp. 0,- (0%).
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 0,- dan realisasi dana sebesar Rp. 0,- (0%).
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;
- a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 0,- dan realisasi dana sebesar Rp. 0,- (0%).
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 0,- dan realisasi dana sebesar Rp. 0,- (0%).
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 1.911.000,- dan realisasi dana sebesar Rp. 0,- (0%).
 - d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 0,- dan realisasi dana sebesar Rp. 0,- (0%).
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 0,- dan realisasi dana sebesar Rp. 0,- (0%).
 - f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 0,- dan realisasi dana sebesar Rp. 0,- (0%).
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah ;
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 2.182.800,- dan realisasi dana sebesar Rp. 845.000,- (38,71%).

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 16.259.800,- dan realisasi dana sebesar Rp. 6.962.000,- (42,82%).
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 6.147.000,- dan realisasi dana sebesar Rp. 4.325.000,- (70,36%).
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 12.000.000,- dan realisasi dana sebesar Rp. 10.564.648,- (88,04%).
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 0,- dan realisasi dana sebesar Rp. 0,- (0%).
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 0,- dan realisasi dana sebesar Rp. 0,- (0%).
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
- a. Pengadaan Mebel, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 3.833.000,- dan realisasi dana sebesar Rp. 3.600.000,- (93,92%).
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 7.564.000,- dan realisasi dana sebesar Rp. 6.600.000,- (87,26%).
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 0,- dan realisasi dana sebesar Rp. 0,- (0%).
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 30.953.400,- dan realisasi dana sebesar Rp. 27.835.886,- (89,93%).
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 2.192.700,- dan realisasi dana sebesar Rp. 0,- (0%).

- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 152.544.000,- dan realisasi dana sebesar Rp. 147.222.039,- (96,51%).
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
 - a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 19.720.000,- dan realisasi dana sebesar Rp. 19.500.000,- (98,88%).
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 18.400.000,- dan realisasi dana sebesar Rp. 11.322.000,- (61,53%).
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ini ditunjang beberapa kegiatan antara lain:
- a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 38.094.400,- dan realisasi dana sebesar Rp. 37.600.000,- (98,70%).
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat ;**
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 40.204.500,- dan realisasi dana sebesar Rp. 32.600.000,- (81,09%).
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ini ditunjang dengan kegiatan :
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan Sub Kegiatan :

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 78.618.000,- dan realisasi dana sebesar Rp. 78.240.000,- (99,52%).
 - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 62.810.000,- dan realisasi dana sebesar Rp. 62.400.000,- (99,35%).
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan
- Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan ini ditunjang dengan Kegiatan :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan :
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 15.077.000,- dan realisasi dana sebesar Rp. 14.550.000,- (96,50%).
 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 17.280.000,- dan realisasi dana sebesar Rp. 11.550.000,- (66,84%).
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 20.400.000,- dan realisasi dana sebesar Rp. 20.050.000,- (98,28%).
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ini ditunjang dengan Kegiatan :
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,

Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan dukungan dana (PAD) sebesar Rp. 46.078.400,- dan realisasi dana sebesar Rp. 45.200.000,- (98,09%).

Realisasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tongas dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2022 (Tahun Berjalan)
Kecamatan Tongas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/-Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Keg. Tahun 2022 (tahun n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program & Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (tahun 2022)			Target Program & Kegiatan Rencana Kerja Kerja SOPD Tahun Berjalan 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SOPD sampai dengan Tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target Renja PD (Tahun 2022)	Realisasi Renja PD (Tahun 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
4.11.12.01 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah</i>		81	2.772.196.250			2.772.196.250			
4.11.12.01 . 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu			9.400.000	-	-	9.400.000	-	-	
4.11.12.01 . 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun		4 Dok	1.100.000			1.100.000			
4.11.12.01 . 01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun		2 Dok	1.100.000			1.100.000			
4.11.12.01 . 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun		2 Dok	1.100.000			1.100.000			
4.11.12.01 . 01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun		2 Dok	1.300.000			1.300.000			
4.11.12.01 . 01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun		2 Dok	1.100.000			1.100.000			
4.11.12.01 . 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Dok	1.300.000			1.300.000			
4.11.12.01 . 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi		2 Monev	2.400.000			2.400.000			
4.11.12.01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu			2.463.010.654			2.463.010.654			
4.11.12.01 . 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bln	2.442.300.654			2.442.300.654			
4.11.12.01 . 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Non PNS, Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Asset serta Perjalanan Dinas		12 Bln	4.500.000			4.500.000			

4.11.12.01 . 02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pemenuhan Penyusunan/verifikasi SKPD		12 Bln	2.400.000			2.400.000			
4.11.12.01 . 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD		12 Bln	2.910.000			2.910.000			
4.11.12.01 . 02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan		12 Bln	4.630.000			4.630.000			
4.11.12.01 . 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		12 Bln	2.860.000			2.860.000			
4.11.12.01 . 02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran		12 Bln	3.410.000			3.410.000			
4.11.12.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu			37.110.200			37.110.200			
4.11.12.01 . 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Perawatan dan Pengoperasian Instalasi Listrik (Belanja Alat Listrik dan Lampu Pijar)		12 Bln	2.440.700			2.440.700			
4.11.12.01 . 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat Tulis Kantor)		12 Bln	11.504.300			11.504.300			
4.11.12.01 . 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Alat Pembersih dan Bahan Pembersih)		12 Bln	4.510.800			4.510.800			
4.11.12.01 . 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan BBM Operasional		12 Bln	12.000.000			12.000.000			
4.11.12.01 . 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bln	600.000			600.000			
4.11.12.01 . 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 Bln	6.054.400			6.054.400			
4.11.12.01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu			13.596.000			13.596.000			
4.11.12.01 . 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pemenuhan Alat Kantor dan Rumah Tangga		1 Unit	5.200.000			5.200.000			
4.11.12.01 . 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2 unit	8.396.000			8.396.000			
4.11.12.01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor		12 Bln	202.829.396			202.829.396			
4.11.12.01 . 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bln	1.000.000			1.000.000			
4.11.12.01 . 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Air, Listrik, Telepon dan Internet)		12 Bln	29.471.100			29.471.100			

4.11.12.01 . 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Alat Kantor		12 Bln	2.440.000			2.440.000			-
4.11.12.01 . 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan Pembayaran Honorarium		12 Bln	169.918.296			169.918.296			
4.11.12.01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik			46.250.000			46.250.000			-
4.11.12.01 . 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik		12 Bln	21.250.000			21.250.000			
4.11.12.01 . 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemenuhan Pajak Kendaraan Dinas		12 Bln	25.000.000			25.000.000			
4.11.12.01 . 15	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar	Kecamatan Tongas	70	85.240.000			85.240.000			
4.11.12.01 . 15	Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan			57.040.000			57.040.000			
4.11.12.01 . 15.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemerintahan Desa		12 Bln	57.040.000			57.040.000			
4.11.12.01 . 18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perekonomian		70	28.200.000			28.200.000			
4.11.12.01 . 18.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perekonomian Kewilayahan yang terlaksana dengan baik ; Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perekonomian Kewilayahan sesuai Tusi		12 Bln	28.200.000			28.200.000			
4.11.12.01 . 19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik		100	119.547.800			119.547.800			
4.11.12.01 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi & fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik			119.547.800			119.547.800			
4.11.12.01 . 19.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan yang terlaksana dengan baik ;jumlah koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan sesuai tusi		12 Bln	18.147.800			18.147.800			
4.11.12.01 . 19.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan		12 Bln	77.400.000			77.400.000			

	wilayah Kerja Kecamatan										
4.11.12.01 . 19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan		12 Bln	24.000.000			24.000.000			
4.11.12.01 . 23	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban		100	77.687.000			77.687.000			
4.11.12.01 . 23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban		12 Bln	77.687.000			77.687.000			
4.11.12.01 . 23.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas Hari Besar Nasional, HUT RI dan Hut Kabupaten Probolinggo		12 Bln	48.600.000			48.600.000			
4.11.12.01 . 23.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		12 Bln	29.087.000			29.087.000			
4.11.12.01 . 27	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Jenis Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik	Kecamatan Tongas	100	31.187.900			31.187.900			
4.11.12.01 . 27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum		12 Bln	31.187.900			31.187.900			
4.11.12.01 . 27.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan		12 Bln	31.187.900			31.187.900			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Probolinggo serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Probolinggo. Dijelaskan dalam ketentuan umum Kecamatan merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Probolinggo yang dipimpin oleh Camat/Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Probolinggo.

Menurut kedudukannya, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan struktur organisasinya, kecamatan yang dipimpin oleh Camat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada umumnya Kecamatan Tongas dapat menjalankan tugas dan fungsi dari 3 sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018 – 2023 dan sudah dapat dilaksanakan seluruhnya. Keberhasilan pencapaian sasaran ini jika dihitung indikator keberhasilannya cukup baik.

Dari beberapa sasaran yang telah dicapai tersebut masih terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini nampak pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran masih pada tingkat *output*, padahal yang menjadi harapan masyarakat adalah indikator kinerja pada tingkat *outcome*.

Capaian sasaran yang ideal memang seharusnya diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat pencapaian hasil (*outcome*), namun demikian indikator tingkat pencapaian hasil (*outcome*) masih belum sepenuhnya tercapai, hal ini disebabkan antara lain:

1. Pencapaian hasil belum sepenuhnya optimal dilaksanakan pada tahun ini;

2. Pencapaian hasil mungkin sudah optimal, namun pengukuran keberhasilannya masih perlu dilakukan dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyebab tidak tercapainya target kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat alur kegiatan yang belum sepenuhnya optimal dalam hal pelaksanaannya;
2. Terkendalanya pagu anggaran indikatif yang direncanakan dengan anggaran yang disetujui.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tongas

NO.	Indikator	Target Renstra SOPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Th. 2019 (tahun n-2)	Th. 2020 (tahun n-1)	Th. 2021 (tahun n)	Th. 2022 (tahun n+1)	Th. 2019 (tahun n-2)	Th. 2020 (tahun n-1)	Th. 2021 (tahun n)	Th. 2022 (tahun n+1)	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Prosentase dokumen pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	
2	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	
3	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	
4	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	
5	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	
6	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	
7	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	
8	Jumlah Monitoring dan Evaluasi	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	
9	Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	
10	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	
11	Jumlah Pembayaran Honorarium Non PNS, Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Asset serta Perjalanan Dinas	8	8	8	8	2	2	2	2	
12	Jumlah Laporan Pemenuhan Penyusunan/verifikasi SKPD	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
13	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	85 %	85 %	85 %	85 %	45	45	45	45	
14	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
15	Jumlah Laporan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	8	8	8	8	2	2	2	2	
	Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran									

16	Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
17	Jumlah Perawatan dan Pengoperasian Instalasi Listrik (Belanja Alat Listrik dan Lampu Pijar)	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
18	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat Tulis Kantor)	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
19	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Alat Pembersih dan Bahan Pembersih)	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
20	Jumlah Penyediaan BBM Operasional	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
21	Jumlah Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	45 %	45 %	45 %	45 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
22	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45	45	45	45	24	24	14	10	
23	Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
24	Jumlah Pemenuhan Alat Kantor dan Rumah Tangga	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
25	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
26	Prosentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
27	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
28	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Air, Listrik, Telepon dan Internet)	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
29	Jumlah Pemeliharaan Alat Kantor	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
30	Jumlah Pemenuhan Pembayaran Honorarium	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
31	Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
32	Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
33	Jumlah Pemenuhan Pajak Kendaraan Dinas	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %

34	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
35	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
36	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pemerintahan Desa	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
37	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
38	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian Wilayah yang terlaksana dengan baik : Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian Wilayah sesuai Tusi	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
39	Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
40	Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
41	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan yang terlaksana dengan baik : jumlah koordinasi dan fasilitas perencanaan pembangunan sesuai tusi	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
42	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
43	Jumlah Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
44	Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
45	Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
46	Jumlah Fasilitas Hari Besar Nasional, HUT RI dan Hut Kabupaten Probolinggo	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
47	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
48	Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
49	Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %
50	Jumlah Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Pelaksanaan program kerja setiap organisasi dalam upaya pencapaian tujuan tidak terlepas dari masalah dengan berbagai skala dan bentuknya. Masalah yang terjadi secara berulang meski pun kecil, sedikit banyak akan menghambat kelancaran pelaksanaan program kegiatan. Untuk menghindari atau meminimalisasi timbulnya permasalahan pada kegiatan mendatang, diperlukan langkah antisipatif sejak proses perencanaan dengan cara mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan rencana periode sebelumnya.

b. Permasalahan yang kerap terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Tongas adalah sebagai berikut:

- Inkonsistensi pelaksanaan atas perencanaan yang telah disusun;
- Ketidakesesuaian antara usulan dengan realisasi anggaran;
- Masih adanya aparatur dengan kinerja belum optimal, kurang inovatif dan kreatif;
- Ketidakesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan bidang tugas aparatur sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kompetensi sdm;
- Sarana pendukung/fasilitas kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi kurang memadai;
- Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan terlalu sering berubah;
- Masyarakat terlalu bergantung kepada bantuan pemerintah untuk menggali dan mengeksplorasi potensi ekonomi sekitarnya;
- Krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi akibat perilaku beberapa oknum aparatur yang tersiar di media.

c. Tantangan yang harus dihadapi kecamatan Tongas sebagai pd dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

- Tuntutan masyarakat semakin beragam dengan latar belakang berbagai kepentingan yang kadang berseberangan;
- Diterbitkannya undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menegaskan bahwa untuk mewujudkan

aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan kompetensi (sistem merit) dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

- Adanya perubahan undang – undang dan/atau peraturan pemerintah tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya termuat beberapa pergeseran kewenangan dan kemungkinan penataan ulang organisasi perangkat daerah; yang memerlukan pemahaman mendalam.

d. Peluang yang dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian tujuan, yaitu:

- Ditetapkannya undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa berikut peraturan turunannya sebagai dasar petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berimplikasi terhadap pendapatan desa semakin bertambah dikarenakan setiap desa yang ada di wilayah kabupaten probolinggo secara umum serta kecamatan Tongas khususnya mendapatkan transfer dari anggaran pusat / apbn yang nominalnya sangat besar sebagai upaya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa masing – masing
- bertambahnya alokasi anggaran kecamatan dari tahun sebelumnya sehingga memungkinkan program dan kegiatan dapat dijalankan dengan optimal.

e. Rekomendasi

- Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat;
- Adanya penambahan pegawai baik pejabat struktural maupun jabatan fungsional umum di kecamatan dan kelurahan;
- dilaksanakannya diklat teknis, diklat fungsional maupun diklat pim bagi aparatur kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan yang ada;

- Terlaksananya koordinasi antar kepala seksi, dan antar upt/uptd dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut:
 - proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (*sustainable*).
 - meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut review terhadap Rancangan Awal RKPD pada Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Jawa Timur :

Tabel 2.3 (T-C.31)
Review Terhadap RKPD Tahun 2022 Kabupaten Probolinggo

Kecamatan Tongas

No.	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tongas	NILAI SAKIP PERANGKAT DAAERAH	81	2.772.196.250	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tongas	NILAI SAKIP PERANGKAT DAAERAH	81	2.772.196.250	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase dokumen pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu		9.400.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase dokumen pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu		9.400.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	4 Dok	1.100.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	4 Dok	1.100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	2 Dok	1.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	2 Dok	1.100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun	2 Dok	1.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun	2 Dok	1.100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	2 Dok	1.300.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	2 Dok	1.300.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	2 Dok	1.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	2 Dok	1.100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2 Dok	1.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	2 Dok	1.300.000	

	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Realisasi Kinerja SKPD			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Monitoring dan Evaluasi	2 Monev	2.400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Monitoring dan Evaluasi	2 Monev	2.400.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu		2.463.010.654	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu		2.463.010.654	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bln	2.442.300.654	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bln	2.442.300.654	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Pembayaran Honorarium Non PNS, Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Asset serta Perjalanan Dinas	12 Bln	4.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Pembayaran Honorarium Non PNS, Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Asset serta Perjalanan Dinas	12 Bln	4.500.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Pemenuhan Penyusunan/verifikasi SKPD	12 Bln	2.400.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Pemenuhan Penyusunan/verifikasi SKPD	12 Bln	2.400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	12 Bln	2.910.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	12 Bln	2.910.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	12 Bln	4.630.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	12 Bln	4.630.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 Bln	2.860.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 Bln	2.860.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran	12 Bln	3.410.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran	12 Bln	3.410.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu		37.110.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu		37.110.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Perawatan dan Pengoperasian Instalasi Listri (Belanja Alat Listrik dan Lampu Pijar)	12 Bln	2.440.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Perawatan dan Pengoperasian Instalasi Listri (Belanja Alat Listrik dan Lampu Pijar)	12 Bln	2.440.700	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat Tulis Kantor)	12 Bln	11.504.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat Tulis Kantor)	12 Bln	11.504.300	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Alat Pembersih dan Bahan Pembersih)	12 Bln	4.510.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Alat Pembersih dan Bahan Pembersih)	12 Bln	4.510.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan BBM Operasional	12 Bln	12.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan BBM Operasional	12 Bln	12.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bln	600.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bln	600.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bln	6.054.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bln	6.054.400	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu		13.596.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu		13.596.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Pemenuhan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1 Unit	5.200.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Pemenuhan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1 Unit	5.200.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	8.396.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	8.396.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor		202.829.396	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor		202.829.396	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bln	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bln	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Air, Listrik, Telepon dan Internet)	12 Bln	29.471.100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Air, Listrik, Telepon dan Internet)	12 Bln	29.471.100	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pemeliharaan Alat Kantor	12 Bln	2.440.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pemeliharaan Alat Kantor	12 Bln	2.440.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Pemenuhan Pembayaran Honorarium	12 Bln	169.918.296	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Pemenuhan Pembayaran Honorarium	12 Bln	169.918.296	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik		46.250.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik		46.250.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik	12 Bln	21.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik	12 Bln	21.250.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		Jumlah Pemenuhan Pajak Kendaraan Dinas	12 Bln	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		Jumlah Pemenuhan Pajak Kendaraan	12 Bln	25.000.000	

	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas			
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tongas	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	70	85.240.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tongas	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	70	85.240.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan		57.040.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan		57.040.000	
	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pemerintahan Desa	12 Bln	57.040.000	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pemerintahan Desa	12 Bln	57.040.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian	70	28.200.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian	70	28.200.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian Wilayah yang terlaksana dengan baik : Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian Wilayah sesuai Tusi	12 Bln	28.200.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian Wilayah yang terlaksana dengan baik : Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian Wilayah sesuai Tusi	12 Bln	28.200.000	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tongas	Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik	100	119.547.800	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tongas	Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik	100	119.547.800	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik		119.547.800	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik		119.547.800	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan yang terlaksana dengan baik ;jumlah koordinasi dan	12 Bln	18.147.800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan yang terlaksana dengan baik ;jumlah koordinasi dan	12 Bln	18.147.800	

			fasilitasi perencanaan pembangunan sesuai tusi					fasilitasi perencanaan pembangunan sesuai tusi				
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan	12 Bln	77.400.000			Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan	12 Bln	77.400.000		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	12 Bln	24.000.000			Jumlah Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	12 Bln	24.000.000		
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Tongas	Prosentase fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	100	77.687.000			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Tongas	Prosentase fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	100	77.687.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Prosentase fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban		77.687.000			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Prosentase fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban		77.687.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Fasilitas Hari Besar Nasional, HUT RI dan Hut Kabupaten Probolinggo	12 Bln	48.600.000			Jumlah Fasilitas Hari Besar Nasional, HUT RI dan Hut Kabupaten Probolinggo	12 Bln	48.600.000		
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Bln	29.087.000			Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Bln	29.087.000		
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tongas	Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik	100	31.187.900			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tongas	Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik	100	31.187.900
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum		31.187.900			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum		31.187.900
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-		Jumlah Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	12 Bln	31.187.900			Jumlah Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	12 Bln	31.187.900		

	Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Negara republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
	Jumlah				3.085.858.950					3.085.858.950	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses pengusulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun perguruan tinggi, kecamatan bertindak sebagai fasilitator/penyelenggara musrenbang. Sedangkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai usulan tersebut tidak masuk dalam Rencana Kerja Kecamatan.

Tabel 2.4 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Probolinggo

Kecamatan Tongas

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TONGAS

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan. Adapun peran kecamatan lebih mengarah pada agenda pembangunan ketujuh, yaitu **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik** melalui Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas.

3.1.2 Kebijakan Provinsi Jawa Timur

Penyusunan tema RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2023 mengacu RKP Nasional Tahun 2023. Oleh karena itu, untuk mendukung sinergitas pembangunan pusat dan daerah, Provinsi Jawa Timur merumuskan tema RKPD tahun 2023 yang akan telah disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik RKPD 2023 Provinsi Jawa Timur yaitu :

“Penguatan Sumberdaya Manusia untuk mendukung Daya Saing Daerah menyambut era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

3.1.3 Keterkaitan Kebijakan Nasional dan Provinsi dengan Kebijakan Kabupaten Probolinggo

Proses pembangunan Kabupaten Probolinggo tidak dapat dilepaskan dari capaian – capaian yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir. Selain telah mencapai beberapa kemajuan yang telah diraih, juga masih menyisahkan beberapa permasalahan yang belum terselesaikan. Visi Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023, adalah : Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi yang mewakili Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Adapun visinya adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing”

Visi tersebut dilandasi dengan dasar nilai – nilai yang telah tertanam didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat yang ada di Kabupaten Probolinggo. Visi pembangunan Kabupaten Probolinggo menjadi dasar yang sistematis bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018-2023. Visi tersebut dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yang brkaitan satu sama lain, makna tersebut dijelaskan berikut :

Visi

Pokok – Pokok Visi

Penjesalasan Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya saing”

Berakhlak Mulia Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo menjadi suatu masyarakat yang memiliki kehidupan yang berperilaku, bersikap dan memiliki perbuatan yang sopan dan santun dalam keragaman masyarakat. Sejahtera Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam keadaan yang makmur, sehat dan damai antar sesama dan dalam keberagaman masyarakat. Keadaan makmur dapat diartikan juga sebagai terwujudnya keutuhan kelestarian lingkungan, sehat dan damai antar sesama dan dalam keberagaman masyarakat. Berkeadilan Mengandung arti bahwa pencapaian kesejahteraan adalah dimana keadaan masyarakatnya menyeluruh, tidak terjadi.

Penjelasasan Visi kesenjangan dengan berdasar kepada penanggulangan masalah – masalah yang dimiliki masyarakat Kabupaten Probolinggo sehingga menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek dikalangan masyarakat. Berdaya Saing Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo memiliki tingkat produktivitas sehingga berkesanggupan atau berkemampuan untuk bersaing dalam menghasilkan output tertentu.

Misi

Misi disusun dalam rangka untuk mengimplementasikan langkah – langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan di atas. Rumusan misi merupakan gambaran dari visi yang ingin di capai dengan menguraikan beberapa upaya yang harus dilakukan. Misi juga memberikan arah yang jelas sekaligus batasan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah direncanakan, maka rumusan Misi harus memiliki keterkaitan dengan Pokok-pokok visi sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Berakhlak Mulia Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran.

2. Sejahtera Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan
3. Berkeadilan Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
4. Berdaya Saing Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi di atas, untuk Tahun 2023 Kabupaten Probolinggo menetapkan Tema Pembangunan, yaitu: **“Mempercepat Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi, Perlindungan Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Dasar.”**

Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam

- *Peningkatan Ketahanan Pangan melalui ketersediaan, distribusi dan keanekaragaman pangan,*
- *Percepatan produksi dan peningkatan daya saing sektor pertanian dan perkebunan yang terdiri dari komoditas peternakan, tanaman pangan dan hortikultura,*
- *Percepatan produksi dan peningkatan daya saing sektor perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya,*
- *Percepatan pertumbuhan sektor Industri, Perdagangan dan UMKM, terutama untuk sektor potensial,*
- *Peningkatan nilai investasi daerah,*
- *Peningkatan sarana prasarana destinasi pariwisata sertifikasi kelembagaan pariwisata dan pemasaran serta pemanfaatan teknologi informasi*

Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

- *Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dimasa pandemic covid-19,*
- *Peningkatan ketahanan daerah dalam upaya menurunkan resiko bencana,*

- *Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat,*
- *Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal (Pengembangan kesetaraan vokasi),*
- *Penanganan dampak pandemic Covid-19 terhadap sektor ketenagakerjaan (optimalisasi BLK),*
- *Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemersalahan sosial lainnya,*
- *Reformasi Birokrasi yang difokuskan pada penguatan Aspek Kelembagaan, SDM Aparatur dan Tatalaksana Birokrasi.*

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 dan prioritas pembangunan nasional, maka **Prioritas Pembangunan Kabupaten Probolinggo untuk tahun 2023** adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan strategis Agropolitan, Minapolitan, Pariwisata, Industri, dan ekonomi kreatif;
2. Penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah melalui Perlindungan sosial, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan peran pemerintah dan lembaga desa;
3. Memutus rantai penyebaran covid-19, Penurunan AKI, AKB, Stunting dan penyakit menular lainnya;
4. Meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah melalui pendidikan formal dan non-formal;
5. Meningkatkan cakupan layanan Infrastruktur Dasar dan penyediaan perumahan layak bagi masyarakat;
6. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.

Guna menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Kecamatan Tongas berusaha menyusun program dan kegiatan dengan

mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi serta pada RPJP dan RPJMD Kabupaten Probolinggo. Dengan demikian, perencanaan pembangunan antara kebijakan nasional, kebijakan Provinsi dan kebijakan Kabupaten Probolinggo serta program kerja Kecamatan Tongas yang bersinggungan langsung dengan masyarakat akan bersinergi. Tentunya program yang disusun kecamatan terbatas pada bidang-bidang yang berada di lingkup Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SOPD.

3.2.1 Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang dimaksud dengan *Tujuan* adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Tongas Tahun 2013 - 2018. Adapun tujuan tersebut adalah:

Tujuan dan Sasaran adalah tahap dimana dirumuskannya sasaran strategis yang dapat menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu untuk dilakukan agar mencapai visi dan misi dengan melalui isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah, Tujuan dibuat berdarakan turunan dari setiap masing-masing misi yang telah ditetapkan dan tetap memperhatikan visi utama. Sedangkan

sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang telah diukur sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang sesuai dengan kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound, dan Continously Improve (SMART-C). Setiap sasaran memiliki indikator yang telah terukur dan terarah secara fokus agar pencapaiannya secara efektif dan efisien. Adapun secara detil rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo

. Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi RPJMD yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Tongas dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan Renstra Kecamatan Tongas sebagaimana misi 3 Tujuan Mewujudkan Keadilan Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Kecamatan

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.	1. Nilai Sakip PD	%	81
		2. Pelayanan Publik Yang Prima	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	70

3.2.2 Sasaran

Sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Kecamatan Tongas, yaitu :

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dirumuskan dengan memperhatikan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan, sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tongas

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tongas pada Tahun 2021 sesuai dengan program yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Tongas Tahun 2018-2023, yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pelaksanaan program ini ditunjang beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Pelaksanaan program ini ditunjang beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan ;
 - Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Pelaksanaan program ini ditunjang beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pelaksanaan program ini ditunjang beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pelaksanaan program ini ditunjang beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 3.2 (T-C. 33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tongas Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Probolinggo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.11.12.01 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP PERANGKAT DAAERAH	Kecamatan Tongas	81%	2.772.196.250			81%	2.772.196.250
4.11.12.01 . 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu			9.400.000	PAD			9.400.000
4.11.12.01 . 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun		4 Dok	1.100.000	PAD		4 Dok	1.100.000
4.11.12.01 . 01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun		2 Dok	1.100.000	PAD		2 Dok	1.100.000
4.11.12.01 . 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun		2 Dok	1.100.000	PAD		2 Dok	1.100.000
4.11.12.01 . 01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun		2 Dok	1.300.000	PAD		2 Dok	1.300.000
4.11.12.01 . 01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun		2 Dok	1.100.000	PAD		2 Dok	1.100.000
4.11.12.01 . 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Dok	1.300.000	PAD		2 Dok	1.300.000
4.11.12.01 . 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi		2 Monev	2.400.000	PAD		2 Monev	2.400.000
4.11.12.01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu			2.463.010.654	DAU			2.463.010.654
4.11.12.01 . 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bln	2.442.300.654	DAU		12 Bln	2.442.300.654
4.11.12.01 . 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Non PNS, Honorarium Pengelolaan Keuangan		12 Bln	4.500.000	PAD		12 Bln	4.500.000

		dan Asset serta Perjalanan Dinas							
4.11.12.01 . 02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pemenuhan Penyusunan/verifikasi SKPD		12 Bln	2.400.000	PAD		12 Bln	2.400.000
4.11.12.01 . 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD		12 Bln	2.910.000	PAD		12 Bln	2.910.000
4.11.12.01 . 02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan		12 Bln	4.630.000	PAD		12 Bln	4.630.000
4.11.12.01 . 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		12 Bln	2.860.000	PAD		12 Bln	2.860.000
4.11.12.01 . 02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran		12 Bln	3.410.000	PAD		12 Bln	3.410.000
4.11.12.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu		12 Bln	37.110.200	PAD		12 Bln	37.110.200
4.11.12.01 . 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Perawatan dan Pengoperasian Instalasi Listrik (Belanja Alat Listrik dan Lampu Pijar)		12 Bln	2.440.700	PAD		12 Bln	2.440.700
4.11.12.01 . 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat Tulis Kantor)		12 Bln	11.504.300	PAD		12 Bln	11.504.300
4.11.12.01 . 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Alat Pembersih dan Bahan Pembersih)		12 Bln	4.510.800	PAD		12 Bln	4.510.800
4.11.12.01 . 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan BBM Operasional		12 Bln	12.000.000	PAD		12 Bln	12.000.000
4.11.12.01 . 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bln	600.000	PAD		12 Bln	600.000
4.11.12.01 . 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 Bln	6.054.400	PAD		12 Bln	6.054.400
4.11.12.01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu			13.596.000	PAD			13.596.000
4.11.12.01 . 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pemenuhan Alat Kantor dan Rumah Tangga		1 Unit	5.200.000	PAD		1 Unit	5.200.000
4.11.12.01 . 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2 unit	8.396.000	PAD		2 unit	8.396.000
4.11.12.01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor			202.829.396	PAD			202.829.396
4.11.12.01 . 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bln	1.000.000	PAD		12 Bln	1.000.000

4.11.12.01 . 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Air, Listrik, Telepon dan Internet)		12 Bln	29.471.100	DAU		12 Bln	29.471.100
4.11.12.01 . 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Alat Kantor		12 Bln	2.440.000	PAD		12 Bln	2.440.000
4.11.12.01 . 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan Pembayaran Honorarium		12 Bln	169.918.296	PAD		12 Bln	169.918.296
4.11.12.01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik			46.250.000	PAD			46.250.000
4.11.12.01 . 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik		12 Bln	25.000.000	PAD		12 Bln	25.000.000
4.11.12.01 . 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemenuhan Pajak Kendaraan Dinas		12 Bln	21.250.000	PAD		12 Bln	21.250.000
4.11.12.01 . 15	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan baik dan lancar	Kecamatan Tongas	70%	85.240.000	PAD		70%	85.240.000
4.11.12.01 . 15	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan		12 Bln	57.040.000	PAD		12 Bln	57.040.000
4.11.12.01 . 15.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pemerintahan Desa		12 Bln	57.040.000	PAD		12 Bln	57.040.000
4.11.12.01 . 18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian		12 Bln	28.800.000	PAD		12 Bln	28.800.000
4.11.12.01 . 18.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian Kewilayahan yang terlaksana dengan baik : Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian Kewilayahan sesuai Tusi		12 Bln	28.800.000	PAD		12 Bln	28.800.000
4.11.12.01 . 19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik	Kecamatan Tongas	100	119.547.800			100	119.547.800
4.11.12.01 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik			119.547.800	PAD			119.547.800
4.11.12.01 . 19.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan yang terlaksana dengan baik :jumlah		12 Bln	18.147.800	PAD		12 Bln	18.147.800

	Pembangunan di Desa	koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan sesuai tuisi							
4.11.12.01 . 19.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan		12 Bln	77.400.000	PAD		12 Bln	77.400.000
4.11.12.01 . 19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan		12 Bln	24.000.000	PAD		12 Bln	24.000.000
4.11.12.01 . 23	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Tongas	100	77.687.000			100	77.687.000
4.11.12.01 . 23	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban			77.687.000				77.687.000
4.11.12.01 . 23.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Hari Besar Nasional, HUT RI dan Hut Kabupaten Probolinggo		12 Bln	48.600.000	PAD		12 Bln	48.600.000
4.11.12.01 . 23.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		12 Bln	29.087.000	PAD		12 Bln	29.087.000
4.11.12.01 . 27	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik	Kecamatan Tongas	100	31.187.900			100	31.187.900
4.11.12.01 . 27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum			31.187.900				31.187.900
4.11.12.01 . 27.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan		12 Bln	31.187.900	PAD		12 Bln	31.187.900
JUMLAH KESELURUHAN									3.085.858.950

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TONGAS

4.1 Rencana Kerja Kecamatan Tongas

Rencana Kerja atau yang biasa disebut Renja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tongas Tahun 2018- 2023, berupa hasil pembangunan Pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Kecamatan Tongas, adapun program Rencana Kerja Tahun 2021 sebagaimana berikut :

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tongas pada Tahun 2023 sesuai dengan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Tongas Tahun 2018-2023, yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pelaksanaan program ini ditunjang beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Pelaksanaan program ini ditunjang beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

- a. Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan ;
 - Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Pelaksanaan program ini ditunjang beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pelaksanaan program ini ditunjang beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pelaksanaan program ini ditunjang beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

4.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Kecamatan Tongas sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) pelaksana teknis kewilayahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tongas Tahun 2018 – 2023

Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi kegiatan Pemerintah Kabupaten di Kecamatan;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kecamatan Tongas, perlu ditetapkan tujuan pembangunan

kecamatan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan Kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan, maka Kecamatan Tongas menetapkan tujuan jangka menengah, sebagai berikut :

1. Peningkatan perekonomian Daerah
2. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat
4. Peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas
5. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan khususnya RTSM dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

Penyelenggaraan tugas dan fungsi tak lepas dari berbagai permasalahan yang kerap menghambat pencapaian tujuan. Beberapa hambatan utama adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan sumber daya manusia yang menguasai Teknologi Informatika Komputer masih kurang memadai;
2. Belum adanya spesifikasi bidang tugas pegawai yang sesuai dengan latar belakang pendidikan;
3. Masih terdapat pegawai yang belum memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas;
4. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas masih kurang memadai;
5. Kondisi sosial masyarakat sebagian besar tingkat pendidikan dan kesejahteraannya masih tergolong rendah; dan
6. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Tongas dalam ikut serta berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan adanya permasalahan di atas, *Standard Operating Procedure (SOP)* dalam melaksanakan pelayanan publik belum dapat dijalankan dengan baik. Standar Pelayanan Minimal belum dapatnya berjalan dengan benar.

Demikian pula pelaksanaan tugas sebuah tim kerja tidak dapat berjalan maksimal oleh karena pemahaman yang kurang terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Hal demikian diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memelihara hasil-hasil pembangunan. Dampaknya kemudian, upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia berjalan lambat atau tidak akseleratif sebagaimana diharapkan.

Selain permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan, berbagai tantangan harus dihadapi Kecamatan Tongas sebagai SOPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Tuntutan masyarakat semakin beragam dengan latar belakang berbagai kepentingan yang kadang berseberangan;
2. Diterbitkannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan kompetensi (sistem merit) dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara.
3. Adanya perubahan Undang – Undang dan/atau Peraturan Pemerintah tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya termuat beberapa pergeseran kewenangan dan kemungkinan penataan ulang organisasi perangkat daerah; yang memerlukan pemahaman mendalam.

Di balik permasalahan dan tantangan, terbuka beberapa peluang yang dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian tujuan, yaitu:

1. Ditetapkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut Peraturan turunannya sebagai dasar petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berimplikasi terhadap pendapatan Desa semakin bertambah dikarenakan setiap Desa yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo secara umum serta Kecamatan Tongas khususnya mendapatkan transfer dari anggaran pusat / APBN yang nominalnya sangat besar sebagai upaya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa masing – masing
2. Bertambahnya alokasi anggaran Kecamatan dari tahun sebelumnya sehingga memungkinkan program dan kegiatan dapat dijalankan dengan optimal.

4.3 Review Terhadap Ranwal RKPD Kabupaten Probolinggo

Tabel berikut menyajikan Review terhadap RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 :

Tabel 4.1
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan
Hasil Review Terhadap RKPD Tahun 2023
Kabupaten Probolinggo
Tahun 2021

Nama SOPD : Kecamatan Tongas

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	Sumber Dana	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tongas	NILAI SAKIP PERANGKAT DAAERAH	81%	2.772.196.250		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase dokumen pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu		9.400.000	PAD	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	4 Dok	1.100.000	PAD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	2 Dok	1.100.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun	2 Dok	1.100.000	PAD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	2 Dok	1.300.000	PAD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	2 Dok	1.100.000	PAD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	1.300.000	PAD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Monitoring dan Evaluasi	2 Monev	2.400.000	PAD	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu		2.463.010.654		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bln	2.442.300.654	DAU	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Pembayaran Honorarium Non PNS, Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Asset serta Perjalanan Dinas	12 Bln	4.500.000	PAD	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Pemenuhan Penyusunan/verifikasi SKPD	12 Bln	2.400.000	PAD	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	12 Bln	2.910.000	PAD	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	12 Bln	4.630.000	PAD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 Bln	2.860.000	PAD	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran	12 Bln	3.410.000	PAD	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu		37.110.200	PAD	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Perawatan dan Pengoperasian Instalasi Listrik (Belanja Alat Listrik dan Lampu Pijar)	12 Bln	2.440.700	PAD	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat Tulis Kantor)	12 Bln	11.504.300	PAD	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Alat Pembersih dan Bahan Pembersih)	12 Bln	4.510.800	PAD	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan BBM Operasional	12 Bln	12.000.000	PAD	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bln	600.000	PAD	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bln	6.054.400	PAD	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu		13.596.000	PAD	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Pemenuhan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1 Unit	5.200.000	PAD	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	8.396.000	PAD	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor		202.829.396	PAD	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bln	1.000.000	PAD	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Air, Listrik, Telepon dan Internet)	12 Bln	29.471.100	DAU	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pemeliharaan Alat Kantor	12 Bln	2.440.000	PAD	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Pemenuhan Pembayaran Honorarium	12 Bln	169.918.296	PAD	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik		46.250.000		

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik	12 Bln	25.000.000	PAD	
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pemenuhan Pajak Kendaraan Dinas	12 Bln	21.250.000	PAD	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tongas	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	70%	85.240.000	PAD	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pemerintahan		57.040.000	PAD	
	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pemerintahan Desa	12 Bln	57.040.000	PAD	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian	12 Bln	28.800.000	PAD	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian Kewilayahan yang terlaksana dengan baik : Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perekonomian Kewilayahan sesuai Tusi	12 Bln	28.800.000	PAD	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tongas	Prosentase peningkatan fasilitas pemberdayaan masyarakat yang terlaksana dengan baik	100	119.547.800	PAD	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah koordinasi & fasilitas pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana dengan baik		119.547.800	PAD	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan yang terlaksana dengan baik :jumlah koordinasi dan fasilitas perencanaan pembangunan sesuai tusi	12 Bln	18.147.800	PAD	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan	12 Bln	77.400.000	PAD	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	12 Bln	24.000.000	PAD	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Tongas	Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	100	77.687.000	PAD	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Prosentase fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban		77.687.000	PAD	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan		Jumlah Fasilitas Hari Besar Nasional, HUT RI dan Hut Kabupaten Probolinggo	12 Bln	48.600.000	PAD	

	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Bln	29.087.000		
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tongas	Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dengan baik	100	31.187.900	PAD	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum		31.187.900	PAD	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan PAD Republik Indonesia		Jumlah Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	12 Bln	31.187.900	PAD	
	JUMLAH				3.085.858.950		

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), bahwa penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai tahap awal dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tongas yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tongas tahun lalu dan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tongas pada tahun berjalan agar bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Tongas Tahun 2023 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Kecamatan Tongas Tahun 2018 - 2023.

Demikian dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2023, dapat dijadikan sebagai pedoman bekerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kegiatan / serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tongas untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

CAMAT TONGAS
KABUPATEN PROBOLINGGO



ABDUL GHAFUR.S.STP.M.Si

Pembina

NIP. 19810214 199912 1 001